

Akses dan Kontrol Politik Perempuan Etnis Cina dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Oleh: Al Rafni

ABSTRACT

This study intended to provides an explanation about the access and control of Chinese Women in general election 2004 in Padang. The data is collected from 180 respondents in Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Padang City through questionnaire and analyzed by using quantitative descriptive method. Data was also collected through deep interview and analyzed by using interactive model analysis. The finding of this research indicated that the access of Chinese women in general election tended to be low except as voters. The low access is parallel to their weakness of control in the election.

Kata Kunci: *Akses politik, kontrol politik, perempuan etnis Cina, pemilu legislatif*

I. PENDAHULUAN

Di masa Orde Baru, perempuan didomestikasi secara politis dan sering dijadikan sebagai alat mobilisasi politik. Lebih lanjut menurut Uhlin¹ (1997) struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru itu dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan sebagai output dari sistem politik.

Khusus untuk kaum perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina (etnis Tionghoa) kondisi diperparah lagi oleh rezim Orde Baru dengan melakukan politik diskriminasi, sehingga kebebasan politik warga keturunan etnis Cina pun terbelenggu². Perempuan etnis Cina mengalami *double discrimination* (diskriminasi ganda). Mereka didiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga karena mereka perempuan.

¹ Uhlin, Anders. 1997. Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia. Terjemahan Rofik Suhud. Bandung: Mizan.

² Hendrik, Doni. 2003. Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang. Skripsi-FISIP Universitas Andalas.

Bahkan menurut Saputra³ masih ada satu diskriminasi lagi (menjadi *triple discrimination*) khususnya buat kalangan etnis Cina di kota-kota besar, termasuk perempuan di dalamnya bahwa mereka sering menjadi target (seringkali direkayasa atau menjadi kambing hitam) kerusuhan massa atau pun tindak kekerasan.

Marjinalisasi politik yang dialami perempuan etnis Cina ditengarai dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa ketidakaktifan etnis Cina (termasuk perempuan) dalam bidang politik adalah bagian dari usaha mereka tidak menonjol dengan harapan dapat tetap mempertahankan posisi mereka di sektor ekonomi. Pendapat lain mengungkapkan bahwa sumber-sumber politik secara formal memang sengaja disumbat oleh penguasa supaya mereka selalu bergantung kepada kekuasaan politik dan mereka bisa dijadikan ‘sapi perah’ ekonomi dan sekaligus ‘kambing hitam’ jika ada masalah-masalah sosial ekonomi yang akut⁴.

Salah satu even politik yang banyak melibatkan kaum perempuan termasuk di dalamnya perempuan etnis Cina adalah even pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa

keberhasilan pelaksanaan pemilu turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum perempuan. Dengan adanya reformasi politik diharapkan marjinalisasi politik perempuan etnis Cina bergerak ke arah pencerahan kehidupan politik termasuk kiprahnya dalam pemilu. Untuk itu menarik diteliti *bagaimanakah akses dan kontrol perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?*

Dalam upaya menemukan jawaban atas masalah penelitian, maka diperlukan pemahaman yang tepat tentang akses dan kontrol politik serta bagaimana posisi perempuan dalam setting politik Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara tentang akses dan kontrol merupakan dua hal yang menjadi inti dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan pemerataan hak-hak politik bagi seluruh rakyat atau warga negara dan dimungkinkannya seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi politik menyangkut kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam rangka menghilangkan rintangan-rintangan pembangunan. Selain itu, menurut Amien Rais⁵,

³ Saputra, Dianthus. 2001. “Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia” dalam *Jurnal Perempuan No.17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

⁴ *Ibid*

⁵ Alfian dan Melly G. Tan (Penyunting). 1988. *Kerangka Pembangunan dan Lepas Landas*. Jakarta: Sinar Harapan.

partisipasi politik juga berarti bahwa keputusan-keputusan politik dalam pembangunan bertujuan pada distribusi kekuasaan politik yang lebih egaliterian. Sedangkan pada tingkat yang paling dasar, partisipasi politik tercermin dalam peran serta masyarakat dalam partai politik, serikat pekerja dan lain-lain.

Sementara itu, Huntington dan Nelson menurut Afan Gaffar⁶ dalam tulisannya *Partisipasi Politik di Indonesia* menggolongkan partisipasi politik ke dalam bentuk kegiatan yang disebutnya: (1) *electoral activities* yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu; (2) *lobbying* yaitu aktivitas individual ataupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang sesuatu hal; (3) *organizational activities* yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap suatu organisasi tersebut, dan terlibat dalam aktivitas organisasi untuk mempengaruhi pemerintah; (4) *contacting* yaitu tindakan individu yang menghubungi secara langsung pejabat pemerintah untuk menyampaikan segala sesuatu persoalannya; dan (5) *violence* atau tindakan yang berbentuk unjuk rasa bahkan kekerasan politik dapat juga dikategorikan sebagai

partisipasi politik.

Dengan demikian partisipasi politik dapat mengambil berbagai bentuk dengan ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari pembuatan keputusan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan politik, pemilu, diskusi politik, keanggotaan dalam partai dan kelompok politik, kontak dengan pejabat politik dan pemerintahan sampai dengan tindakan-tindakan politik dalam bentuk kekerasan seperti demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, kudeta, revolusi dan lain-lain.

Makna terdalam partisipasi politik menurut Sutoro Eko⁷ adalah *voice*, akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan kehidupannya. Lebih jauh Eko memberi kejelasan terhadap makna substantif partisipasi itu sebagai berikut:

Pertama, *voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk

⁶ Gaffar, Afan. 1991. "Partisipasi Politik di Indonesia" dalam *Prospektif Nol.1 Vol.3*. Yogyakarta : FISIPOL-UGM.

⁷ Eko, Sutoro. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press.

dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses : keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan dan lain-lain.

Ketiga, kontrol merupakan kemampuan warga melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Beranjak dari pemaparan esensi partisipasi sebelumnya dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam politik akan menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Artinya perempuan bukanlah sebagai hamba (*client*) tetapi sebagai warga (*citizen*) sehingga ia adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak untuk memiliki. Selain itu perempuan sebagai bagian dari segmen masyarakat juga akan menjadi *partner* dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk tidak menjadi sekadar objek pasif penerima kebijakan melainkan

sebagai subjek aktif menentukan kebijakan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa partisipasi politik memberi peluang bagi keterlibatan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengambil peran dalam proses politik. Membicarakan keterlibatan perempuan Etnis Cina dalam kehidupan politik di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari kajian seputar keterlibatan perempuan Indonesia secara umum dalam bidang politik. Uniknyanya adalah bahwa keterlibatan perempuan etnis Cina di Indonesia mengalami marjinalisasi yang berlapis atau *double* bahkan *triple discrimination*. Pertama, mereka termarjinalisasi dalam kehidupan politik dikarenakan mereka perempuan. Kedua, mereka termarjinalisasi di kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas yang seringkali menjadi 'sasaran' bagi penguasa dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Dikatakan etnis minoritas karena jumlah populasi etnis Cina di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang (kurang dari 3%) dari total populasi seluruh Indonesia yang berjumlah 202 juta orang⁸.

Walaupun sebagai etnis minoritas namun jaminan hukum atas aktifitas politik mereka tetap sama

⁸ Freedman, Amy L. 2000. Political Participation and Ethnic Minorities: Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States. London: Routledge.

sebagaimana pemerintah memberikan jaminan yuridis formal melalui beberapa regulasinya kepada seluruh WNI tanpa kecuali. Jaminan yuridis yang diberikan melalui UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan dan laki-laki WNI untuk masuk ke dunia politik. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya terdapat beberapa peraturan perpolitikan di Indonesia yang memberikan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%,

5 tahun setelah Konferensi Beijing⁹.

Secara umum partisipasi politik etnis Cina di Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Pertama, secara formal melalui partai politik berasimilasi dimana masyarakat etnis Cina (baik perempuan atau laki-laki) yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi. Sebagai contoh pada masa Orde Baru berintegrasi dengan Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para tokoh terkenal dari etnis Cina antara lain Yusuf Wanandi (nama asli Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dan Djoko Sudyatmiko (Lie Giok Hauw)¹⁰. Kedua, bentuk partisipasi informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non politik dan kelompok-kelompok penekan. Sebut saja contohnya Badan Komunikasi (Bakom) yang dibentuk Pemerintah Orde Baru tahun 1977 yang berfungsi sebagai badan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Contoh lain organisasi Prasetya Mulya yang didirikan tahun 1980 merupakan sebuah yayasan yang berkepentingan membantu pemerintah

⁹ Suyanto, Isbodroini. 2003. *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittinggi, 16 Oktober 2003.

¹⁰ Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta : LP3ES.

melaksanakan program-program sosial. Eksistensi kelompok-kelompok penekan dari etnis Tionghoa ini tidak terlalu menonjol. Dalam konteks ini terdapat pandangan bahwa ketidakaktifan etnis Tionghoa dalam bidang politik merupakan strategi mereka mempertahankan posisi di sektor ekonomi. Disamping itu juga ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak aktifnya etnis ini di bidang politik sebagai implikasi dari kebijakan penguasa yang menyumbat sumber-sumber politik formal. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan mereka kepada kekuasaan politik¹¹.

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan bagi etnis minoritas ini untuk berkiprah dalam bidang politik. Satu langkah kongkrit yang ditempuh pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pecelekan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai, yang kembali hadir di tengah-tengah perayaan imlek dan kisah-kisah bernuansa Cina pun bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan menjadikan Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai lokus penelitian. Hal ini disebabkan besar-

¹¹ Saputra, 2001. *Op cit.*

nya jumlah komunitas Cina (Tionghoa) yang berdomisili di sini. Responden penelitian berjumlah 180 orang etnis Cina (Tionghoa) yang terdiri dari masing-masing 90 orang perempuan dan 90 orang lainnya laki-laki. Pengambilan sampel menggunakan Formula Frank Lynch¹². Sementara itu pengumpulan data menggunakan angket serta wawancara mendalam. Sedangkan analisis data menggunakan metoda statistik prosentase normal¹³ untuk data kuantitatif dan analisis kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman¹⁴ untuk data kualitatif. Disamping itu juga menggunakan analisis gender dalam memotret perbedaan akses dan kontrol politik antara perempuan dengan laki-laki etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana akses atau keterlibatan responden dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang dicermati melalui penjarangan jawaban responden terhadap hal-hal sebagai berikut: (a) akses pada tahap

¹² Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

¹³ Yusuf, A, Muri. 1985. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang.

¹⁴ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1979. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

pemungutan dan penghitungan suara meliputi ikut memilih, menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses penghitungan suara, menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (b) akses pada tahapan kampanye meliputi menjadi juru kampanye, panitia pelaksana, menjadi simpatisan/penggembira, menjadi tim sukses kandidat, dan memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan; (c) akses terhadap partai politik meliputi terdaftar sebagai anggota partai, menjadi pengurus partai, menjadi relawan partai, dan mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Data empiris tentang akses atau keterlibatan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang yang terungkap melalui tabel 1, menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis akses yang terlihat tinggi yaitu: *Pertama*, akses atau keterlibatan dalam memilih (melakukan pemberian suara), dimana semua responden (100%) menyatakan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif tersebut. *Kedua*, sejumlah 20% responden juga memberikan pernyataan turut memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan. *Ketiga*, menjadi simpatisan/penggembira suatu partai dinyatakan oleh sejumlah 16,67% responden. Sedangkan jenis akses yang lain terlihat sangat rendah sekali, terutama sekali dalam hal-hal yang menuntut kecakapan/*skill* politik tertentu. Akses

yang rendah tersebut berhubungan dengan hal-hal seperti menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, menjadi juru kampanye, serta menjadi tim sukses kandidat. Sedangkan akses terhadap partai politik juga sangat rendah pada hampir semua elemen pencermatan tentang hal-hal terkait dengan terdaftar sebagai anggota, menjadi pengurus partai, terlebih mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Dalam konteks ini tak satu pun dari responden perempuan yang menyatakan keterlibatannya. Hanya dalam bentuk sebagai relawan partai, akses atau keterlibatan responden perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu. Itupun dalam jumlah yang sangat kecil yaitu 3,33%.

Pelacakan yang sama terhadap responden laki-laki memberikan penjelasan bahwa mereka pun memiliki akses atau keterlibatan yang rendah. Responden memberikan pernyataan bahwa keterlibatan mereka yang lebih menonjol dalam hal pemberian suara (100%) dan menjadi simpatisan/penggembira dalam kampanye sebesar 37,77%. Meskipun secara keseluruhan responden laki-laki juga memiliki akses yang rendah dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu, namun manakala dibandingkan responden perempuan ternyata mereka memiliki tingkat akses atau keterlibatannya juga dalam hal

berikut: (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara; (2) terlibat dalam proses penghitungan suara; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (4) memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan ; dan (5) menjadi relawan partai. Hanya saja porsi yang terlibat dalam aktivitas ini hanya kecil, berkisar 3,33% - 8,89% saja.

Dari keseluruhan akses yang terjaring ternyata keterlibatan responden yang terbesar adalah dalam *moment* pemberian suara. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan (akses) perempuan dalam pemilu berada pada hirarkhi terendah. Rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) tidak terlepas dari imej mereka tentang kehidupan politik. Menarik untuk dicermati pendapat salah seorang responden YS berikut ini.

*“Bagi kami politik itu adalah suatu pembicaraan yang tidak perlu dilakukan di arena umum. Membicarakan kehidupan politik itu harus penuh kehati-hatian. Salah-salah cakap akan mendatangkan bala pada kita.”*¹⁵.

Dari pernyataan tadi tersirat secara jelas ketakutan etnis ini (perasaan traumatik) untuk berbicara politik apalagi untuk banyak terlibat dalam urusan politik seperti menjadi pengurus partai, penggerak massa dalam kampanye, ataupun menjadi pemantau dalam pemilu. Sebagaimana terungkap dari pandangan responden NS.

*“Bagi saya pribadi, ikut dalam kegiatan partai atau aktifitas politik lainnya adalah sesuatu yang sangat sulit, karena waktu dan kesempatan untuk itu tidak ada. Selain mengurus keluarga, saya juga bekerja/dagang sehingga tidak ada lagi perhatian untuk partai ini dan itu”*¹⁶.

¹⁵ Wawancara tanggal 27 Agustus 2007

¹⁶ Wawancara tanggal 17 September 2007

Tabel 1 : Akses atau Keterlibatan Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Akses	Kategori Jawaban Responden Perempuan		Kategori Jawaban Responden Laki-laki	
		Terlibat	Tidak terlibat	Terlibat	Tidak terlibat
1.	<i>Tahap pemungutan dan penghitungan suara</i>				
	a. ikut memilih dalam pemilu	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)
	b. menjadi panitia pelaksana pemungutan suara	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	c. terlibat dalam proses penghitungan suara	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	d. menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.	1 (1,11%)	89 (98,89%)	3 (3,33%)	87 (96,67%)
2.	<i>Tahap kampanye</i>				
	a. menjadi juru kampanye	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	b. menjadi panitia pelaksana	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	c. menjadi simpatisan/ penggembara	15 (16,67%)	75 (83,33%)	34 (37,77%)	56 (62,23%)
	d. menjadi tim sukses kandidat	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	e. memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan	18 (20%)	72 (80%)	8 (8,88%)	82 (91,12%)
3.	<i>Terhadap partai politik</i>				
	a. terdaftar sebagai anggota	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	b. menjadi pengurus partai	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	c. menjadi relawan partai	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	d. mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Kontrol merupakan kemampuan warganegara untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Dalam hal ini penjangkaran kontrol perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang melalui pengungkapan hal-hal sebagai berikut: (a) pertim-

bangkan dalam memilih kandidat caleg dan kandidat DPD; (b) saksi dalam pemilu; (c) pemantau dalam pemilu; (d) mempelajari program partai politik khususnya yang memberdayakan perempuan; (e) menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat; dan (f) mengawasi peluang terjadinya *money politic* dalam seluruh kegiatan pemilu.

Tabel 2 : Kontrol Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Kontrol	Pernyataan Responden Perempuan		Pernyataan Responden Laki-laki	
		Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1.	Pertimbangan dalam memilih kandidat.	43 (47,78%)	47 (52,22)	67 (74,44%)	23 (25,56%)
2.	Saksi dalam pemilu	1 (1,11%)	89 (98,89%)	3 (3,33%)	87 (96,67%)
3.	Pemantau dalam pemilu.	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
4.	Mempelajari program partai khususnya isu pemberdayaan perempuan.	18 (20%)	72 (80%)	8 (8,88%)	82 (91,12%)
5.	Menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat.	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
6.	Mengawasi peluang terjadinya <i>money politic</i> .	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Kontrol responden, baik perempuan maupun laki-laki etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang berdasarkan data tabel 2 dapat dikatakan lemah. Hanya satu jenis kontrol yang bisa dilakukan yaitu saat memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat. Sebagian responden sudah bisa mengontrol sendiri ke mana dan kepada siapa mereka memberikan suaranya melalui pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari diri sendiri maupun orang tua, dan keluarganya. Kontrol dalam melakukan pilihan adalah sesuatu yang esensial dalam politik. Terutama dalam sejarah panjang perjuangan perempuan untuk eksis dalam mempertahankan hak politiknya. Selain itu kontrol yang dapat mereka lakukan hanya terhadap persoalan program khususnya isu pemberdayaan perempuan dan proporsi mereka yang terlibat pun rendah.

Namun kemandirian yang mengembirakan ini tidak diikuti oleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Penjarangan hal ini terhadap responden ternyata mengungkapkan bahwa secara umum dalam empat tema kontrol yang diamati, responden tidak mampu melakukan kontrol yang seharusnya bisa mereka lakukan. Lemahnya kontrol responden ditunjukkan oleh tidak satu pun dari responden perempuan maupun laki-laki yang dapat melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu legislatif 2004 lalu . Hanya dalam jumlah sangat kecil responden perempuan maupun laki-laki yang menyatakan melakukan kontrol sebagai saksi dalam pemilu, proporsi masing-masing adalah 1,11% dan 3,33% saja.

Lemahnya kontrol yang mereka lakukan menurut pengakuan beberapa responden yang diwawancarai karena adanya faktor risiko, disamping itu

juga rendahnya pengetahuan dan minat perempuan etnis Cina (Tionghoa) untuk berkecimpug di bidang politik.

Triple discrimination yang dialami perempuan etnis Cina (Tionghoa) diharapkan akan segera hilang dengan berubahnya format politik sejak bergulirnya reformasi politik pada Mei 1998, hampir sepuluh tahun yang lalu. Jika ditelusuri lebih jauh upaya pencerahan hak-hak keturunan etnis Cina (Tionghoa) telah dilakukan sejak dikeluarkannya Keppres No.6 tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden yang mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan untuk merayakan upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Cina (Tionghoa) secara terbuka. Dua tahun berikutnya, Megawati selaku presiden waktu itu mengeluarkan Keppres No.191 tahun 2002 yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal yang lebih menggembirakan lagi bagi etnis Cina (Tionghoa) adalah dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan “mengakhiri diskriminasi etnis sejak 11 Juli 2006”.

Momentum-momentum tersebut selayaknya dapat menjadi *entry point* bagi etnis Cina (Tionghoa) pada umumnya dan perempuan etnis Cina (Tionghoa) pada khususnya untuk lebih berkiprah di berbagai bidang, khususnya bidang politik yang selama ini teralienasi dari kehidupan mereka.

Kesadaran gender (*gender awareness*) umumnya akan terbentuk apabila pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap perannya dalam politik serta pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang politik telah membudaya di dalam pribadi perempuan itu sendiri. Tanpa kesadaran ini mustahil dilakukan peningkatan dan pemberdayaan peran perempuan di bidang politik.

Terlepas dari ada tidaknya kesadaran gender yang dimiliki oleh responden tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini relasi hubungan gender dikungkung oleh budaya patriarkhi yang menganggap laki-laki superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik mau pun publik. Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan¹⁷.

Konstruksi budaya yang demikian kemudian diikuti pula dengan karakter struktur dan sistem yang tidak mendukung keberadaan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam politik yang mengalami *triple discrimination* yaitu mereka terdiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga

¹⁷ Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

karena mereka perempuan dan sering dijadikan target (sering direkayasa dan dikambinghitamkan) melalui tindak kekerasan maupun kerusuhan massal.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat secara alamiah atau pengkategorian masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (*merit*).

Diskriminasi yang telah lama dilakukan membuat sebagian besar perempuan etnis Cina (Tionghoa) sebetulnya tidak begitu peduli akan keadaan politik, mereka dapat dikatakan tidak memihak atau berkiblat ke politik mana pun. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup tenteram lahir bathin dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk politik. Hal ini terungkap dari akses mereka dalam pemilu legislatif 2004.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 13 jenis akses yang dijaring ternyata akses dalam memilih yang berkategori tinggi (baik). Sementara dalam kategori cukup akses memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan (20%), dan akses menjadi simpatisan/ penggembira

dalam kampanye (16,67%). Sisanya ternyata tergolong sangat rendah yaitu: (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara; (2) terlibat dalam proses penghitungan suara; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (4) menjadi juru kampanye; (5) menjadi panitia pelaksana kampanye; (6) menjadi tim sukses kandidat; (7) terdaftar sebagai anggota partai; (8) menjadi pengurus partai; (9) menjadi relawan partai; dan (10) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Rendahnya akses atau tingkat keterlibatan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu (kecuali pada akses ikut memilih) ternyata paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka lakukan. Temuan penelitian menunjukkan dari enam jenis kontrol yang diamati hanya pada kontrol *pertimbangan dalam memilih kandidat* saja yang dapat dikategorikan baik. Sementara itu sisanya yaitu kontrol mereka sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic* ditemukan sangat lemah. Kenyataan tersebut berlaku juga bagi responden laki-laki.

Akses dan kontrol merupakan bagian dari substansi partisipasi politik. Menurut Milbrath dan Goel,

partisipasi politik baik dalam bentuk akses dan kontrol pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu: (1) apatis, yaitu orang-orang yang menarik diri dari proses politik; (2) spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut pemilu; (3) gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik; dan (4) pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk non konvensional seperti mengajukan petisi, mogok, unjuk rasa dan demonstrasi¹⁸.

Bila merujuk pada pendapat Milbrath dan Goel, ternyata partisipasi perempuan etnis Cina (Tionghoa) tergolong pada tipe apatis dan menuju ke tipe spektator. Menarik untuk mencermati pendapat Kendingen, bahwa untuk dapat ke tipe gladiator, ada dua cara yang ditempuh secara internal yaitu : *Pertama*, secara psikologis, para perempuan yang ingin terjun ke dunia politik praktis harus melawan kadar subjektifitasnya seperti mengurangi kadar emosi, berpikir rasional, dan jangan mengandalkan *feeling*, hilangkan egoisme. *Kedua*, secara politik perempuan harus lebih sering tampil di depan publik sehingga sosialisasi politik perempuan berada dalam perspektif yang lebih luas ketimbang seputar kasus dan dapur. Dalam konteks ini langkah pertama yang harus dila-

kukan adalah menghilangkan rasa apatis dengan meningkatkan rasa kepedulian (*care*) terhadap dunia politik. Kemudian untuk dapat tampil sejajar dengan yang lainnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendorong partisipasi politik perempuan dan laki-laki etnis Cina (Tionghoa) melalui program khusus yang berfungsi sebagai *special treatment* bagi mereka untuk berkontribusi dalam bidang politik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Beranjak dari temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu secara umum rendah terutama dalam hal-hal berikut: (a) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara; (b) terlibat dalam proses penghitungan suara; (c) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (d) menjadi juru kampanye; (e) menjadi panitia pelaksana kampanye; (f) menjadi tim sukses kandidat; (g); terdaftar sebagai anggota partai; (h) menjadi pengurus partai; (i) menjadi relawan partai; dan (j) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Hanya dalam tiga jenis akses yang dapat digolongkan tinggi yaitu ikut memilih dalam pemilu. Sementara mem-

¹⁸ Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

- perjuangkan isu pemberdayaan perempuan dan menjadi simpatisan/penggembira dalam kampanye berada pada kategori cukup.
- 2) Rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka berikan. Kontrol yang dapat mereka lakukan hanya dalam memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun anggota DPD. Sementara itu dalam hal kontrol lainnya masih tergolong lemah. Dalam konteks ini tercakup kontrol terhadap hal-hal berikut: sebagai saksi dan pantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS

setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic*.

Saran

- 1) Diharapkan adanya usaha yang simultan dari semua pihak untuk dapat memberdayakan perempuan etnis Cina (Tionghoa) di bidang politik. Sinergisitas ini hendaknya dikoordinir oleh Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Provinsi.
- 2) Bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) sendiri diharapkan adanya upaya memberdayakan diri melalui beberapa sarana pendidikan agar dapat memiliki akses dan kontrol yang baik dalam kehidupan politik umumnya dan aktifitas politik khususnya seperti even pemilu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian dan Melly G. Tan (Penyunting). 1988. *Kerangka Pembangunan dan Lepas Landas*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Freedman, Amy L. 2000. *Political Participation and Ethnic Minorities: Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States*. London: Routledge.
- Gaffar, Afan. 1991. "Partisipasi Politik di Indonesia" dalam *Prospektif Nol.1 Vol.3*. Yogyakarta : FISIPOL-UGM.
- Hendrik, Doni. 2003. *Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. Skripsi-FISIP Universitas Andalas.

- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1979. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, Dianthus. 2001. "Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan No.17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta : LP3ES.
- Suyanto, Isbodroini. 2003. *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittinggi, 16 Oktober 2003.
- Uhlen, Anders. 1997. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Terjemahan Rofik Suhud. Bandung: Mizan.
- Yusuf, A, Muri. 1985. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang.

